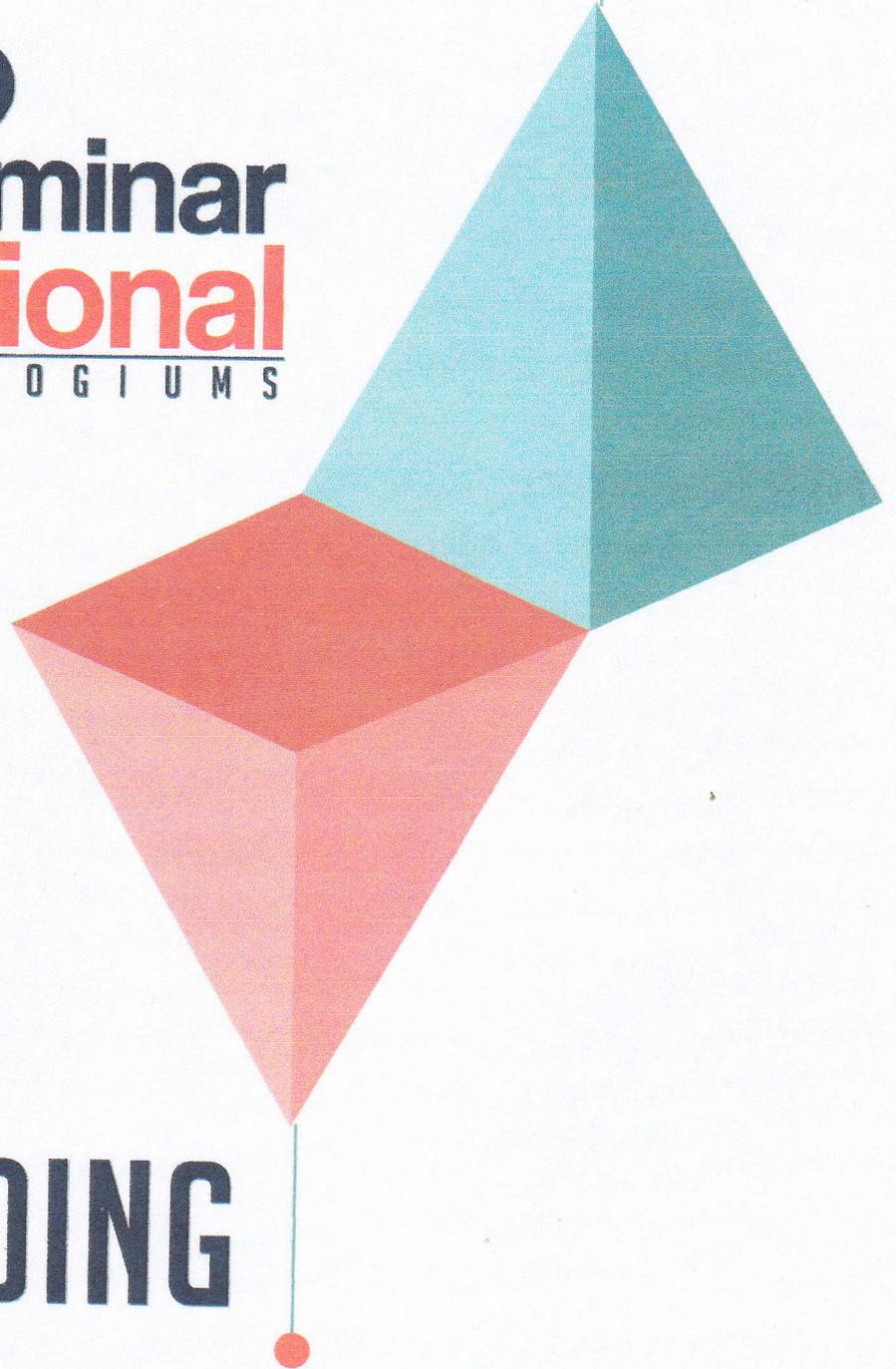


2015
Seminar
Nasional
PSIKOLOGIUMS



PROCEEDING

**Selamatkan Generasi Bangsa Dengan
Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal**

Ishartiwi

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"

KECERDASAN INTERPERSONAL PADA REMAJA YANG PERNAH MENJADI KORBAN CHILD ABUSE	
Dinie Ratri Desiningrum	86
GAMBARAN SIKAP ORANG TUA TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN PADA ANAK USIA SEKOLAH KETIKA MELAKUKAN KESALAHAN	
Elok Triestuning.....	96
HUBUNGAN ANTARA STRES AKADEMIS DENGAN KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS REMAJA	
Eska Prawisudawati Ulpa.....	103
PROGRAM PEER EDUCATION SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI INDONESIA	
Hazhira Qudsyi	110
MENCARI JEJAK SPIRITUAL PARA PETUALANG NAPZA	
Ima Sri Rahmani, MA., Psikolog.....	115
KEKERASAN PADA ANAK DALAM KELUARGA	
Rina Jayanti, Rini Lestari	128
PERBEDAAN PROKRASTINASI AKADEMIK DITINJAU DARI <i>LOCUS OF CONTROL</i> PADA MAHASISWA	
Intaglia Harsanti, Khoirunnisa	136
MODEL MULTI SEKTORAL PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN BERBASIS POTENSI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SEBAGAI GENERASI BANGSA	
Dr. Ishartiwi, M. Pd.....	143 ✓
MEDIA RAMAH ANAK	
Jusuf Tjahjo Purnomo.....	154
BATASAN USIA PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN TINJAUAN PSIKOLOGI ISLAM	
Muna Faiza Amatullah.....	174
THEORY OF MIND PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH DITINJAU DARI KONFLIK DENGAN SAUDARA KANDUNG	
Nur Azizah, S.Psi.M.A.M Stefani Padu	187
PERAN ORANG TUA DALAM IMPLEMENTASI <i>HOMESCHOOLING</i> PADA ANAK USIA DINI	
Qurrota A'yun, Nanik Prihartanti, M.Si.....	196

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"

PROCEEDING

**Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal
Jilid 2**

TIM

**CIIP
2015**

ISBN : 978-602-71716-3-3

i

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"

**PROCEEDING, Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis
Kearifan Lokal Jilid 2**

Penulis :

TIM

ISBN :

978-602-71716-3-3

Editor :

Tim Fakultas Psikologi UMS

Desain Sampul & Tata Letak :

Riza Mahmud, Afifah Nur Aini, Rizkya Angkin Pertiwi

Penerbit :

CIIP

Redaksi :

Gedung L, Lantai 2

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani, Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura

Surakarta, Jawa Tengah 57162

MODEL MULTI SEKTORAL PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN BERBASIS POTENSI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SEBAGAI GENERASI BANGSA

Dr. Ishartiwi, M. Pd.

Pendidikan Luar Biasa - Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: buisyk@yahoo.com

Abstrak. Anak berkebutuhan khusus (ABKh) tumbuh sebagai generasi bangsa yang dianugerahi hambatan dalam perkembangan aspek fisik, emosi, sosial maupun multi aspek. Kondisi ini berdampak pada heterogenitas karakteristik dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan kehidupan. Meskipun dalam kondisi terbatas ABKh masih memiliki potensi diri yang dapat dikembangkan melalui belajar. Di sisi lain ABKh dengan kondisinya tetap sebagai warganegara yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana generasi muda pada umumnya. Oleh karena itu peran lingkungan sangat vital untuk memfasilitasi pengembangan potensi tersebut melalui peran keluarga, sekolah dan masyarakat. Berdasar hasil-hasil penelitian menggambarkan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat masih memandang ABKh dari sisi kondisinya fisik (penampakan luar) dan diidentikan dengan ketidakmampuan dan ketergantungan pihak lain dalam hidup atau sebagai beban masyarakat. Sedangkan telah banyak bukti bahwa melalui intervensi yang tepat ABKh dapat mengembangkan potensinya bahkan dapat juga mencapai hasil kemandirian melebihi anak normal. Fenomena permasalahan ini sebagian besar muncul karena faktor budaya masyarakat dan minimnya pengetahuan tentang layanan bagi ABKh. Masyarakat hanya berteumpu pada lembaga sekolah untuk mengembangkan kemandirian ABKh atau bahkan malah membiarkan tanpa ada intervensi pendidikan. Terkait dengan hal ini penting untuk dikaji tentang model pengembangan potensi ABKh untuk mencapai generasi bangsa yang mandiri. Model Multi Sektoral Berbasis Potensi ABKh dipandang sesuai untuk pengembangan kemandiriannya. Model ini memberikan langkah nyata melalui asesmen kebutuhan ABKh sebagai dasar penetapan program layanan pengembangan seluruh potensi ABKh sebagai insan manusia dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, yakni: keluarga, lembaga sekolah, masyarakat di lingkungan ABKh dan masyarakat dunia usaha dan regulasi pemerintah. Model ini berdasarkan pertimbangan pandangan bahwa generasi bangsa mandiri adalah generasi yang mampu melayani diri sendiri dan seminimal mungkin tergantung orang lain, sebagai pelaku ekonomi dan berperan serta sebagai masyarakat/warganegara sesuai potensinya

Kata kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Kemandirian, Model pengembangan program, peran keluarga, sekolah dan masyarakat.

Latar Belakang Masalah

Dunia Internasional mengajak serempak seluruh negara untuk memiliki komitmen memberikan layanan hak pendidikan untuk setiap warga negara termasuk dalam hal ini warga ABKh. Hal ini diatur dalam berbagai kesepakatan, antara lain: *Education for All* (1990), di Thailand. Melalui Konvensi Hak Penyandang Cacat, 2006 disahkan 2007 (*The Convention on the Human Rights of Persons with disabilities and Optional Protocol to the Convention*) dan berbagai perundangan lainnya. Menilik kesepakatan internasional tersebut, di

Indonesia telah ditetapkan komitmen pendidikan untuk semua sejak kemerdekaan negara ini. Hal ini dapat dilihat dari Pokok Pikiran kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: "Manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dan kehidupan masyarakat". Selanjutnya ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1-5 tentang Hak pendidikan yang layak dan Peran pemerintah bagi seluruh warga. Implementasi dari pemikiran ini diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN),

praktis tentang layanan ABKh sekaligus untuk penyebarluasan layanan pendidikan bagi ABKh secara luas. Terkait dengan hal ini maka sajian artikel ini mengfokuskan pada model pengembangan kemandirian ABKh berbasis potensi diri yang meibatkan berbagai sektor bidang keahlian dan kelmbagaan. Hal ini didasri bahwa ABKh dengan berbagai kondisinya merupakan warga negara dan generasi bangsa yang memiliki hak sama dengan generasi muda pada umumnya. Adanya layanan yang dapat mengembngkakan kemandirian ABKh dapat menciptakan kualitas generasi bangsa dan mengurangi beban ketergantungan ABKh. Meskipun untuk kondisi ABKh dengan kekhususan kompleks akan terbatas capaian kemandiriannya. Artinya ABKh dengan kondisi tersebut tidak dapat mandiri penuh tetapi hanya aspek-aspek kegiatan sederhana yang dapat dilakukan dan kekiatan hidup yang kompleks tetap memerlukan bantuan.

Tujuan Penulisan

Tujuan umum penulisan artikel ini yaitu mengkaji tentang model intervensi pendidikan anak berkebutuhan khusus untuk membentuk generasi bangsa mandiri sesuai potensinya, berdasarkan analisis konseptual dan kondisi fakta lapangan layanan pendidikan dan keterlibatan masyarakat.

Tujuan khusus penulisan artikel ini yaitu: 1) mengkaji tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan kebutuhan program layanan, 2) mengembangkan *prototipe* model pendidikan untuk kemandirian sesuai potensi anak berkebutuhan khusus yang melibatkan berbagai pihak terkait,

Manfaat Penulisan

1. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pengambil kebijakan tentang berbagai kondisi, permasalahan, potensi serta isu strategis berkaitan dengan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
2. Menyajikan strategi sebagai dasar pijakan penetapan program dan kegiatan

dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, utamanya terkait dengan penyiapan SDM, lingkungan yang aksesibel untuk layanan pendidikan khusus untuk membentuk generasi bangsa yang mandiri.

Kajian Pustaka

1. Gambaran Umum Anak Berkebutuhan Khusus

Hallahan & Kauffman mengemukakan konsep awal (1988) ABKh dengan istilah *exceptional children*, dan pada perkembangannya disebut (2009) deflab istilah *Children with Special Needs* yang mencakup: *Speech impaired, Mentally retarded, Emotionally disturbed, Learning disabled, Hearing impaired, Deaf/blind and other multihandicapped, Crippled and other health impaired, Visually handicapped*. Menurut Smith & Luckasson (1992) menyebut dengan istilah *children with special needs*, yang mencakup tipe-tipe: *Learning Disabled (LD), Speech or language impaired (SI), Mental Retarded (MR), Emotionally Disturbed, Multihandicapped (MH), Hard of Hearing and Deaf (HH), Other Health Impaired (OH), Orthopedically Impaired (OI), Visually Handicapped (VH), Deaf-blinb (DB)*. Istilah ABKh di Indonesia berdasarkan regulasi Permen Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, disebutkan jenis kekhususan, yakni: 1) tunagrahita, 2) Anak Berkesulitan Belajar, 3) Anak hiperaktif, 4) tunalaras, 5) tunarungu wicara, 6) tunanetra, 7) autistik, 8) tunadaksa dan (9) anak berbakat (*giftedness and special talents*). Masing-masing jenis kekhususan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu jenis kekhususanpun dapat juga memiliki perbedaan karakteristik. Variasi yang

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"

Nomor 20 Tahun 2003, sebagai pengganti UUSPN, Nomor 2 tahun 1989, serta peraturan operasional di bawahnya. Dari tinjauan regulasi menunjukkan adanya fasilitasi tentang layanan pendidikan untuk ABKh. Hal ini untuk mencapai kualitas hidup ABKh setara dengan generasi bangsa pada umumnya.

Dari tinjauan konseptual tentang ABKh, padang pendidikan memberi pengertian anak berkebutuhan khusus sebagai anak yang memiliki karakteristik khusus dan individual sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus (Hallahan dkk., 2006). Lebih rinci dijelaskan bahwa kekhususan dapat diartikan dari kondisi individu penyandang ketidakmampuan fisik, emosi, sosial (*Individuals with Disabilities*) dan individu karena kondisi tertentu mempunyai kebutuhan belajar khusus (*Individuals with different abilities*) (Ishartiwi, 2007). Selanjutnya dijelaskan terkait dengan kondisi dan karakteristik ABKh, maka layanan program pendidikan bagi ABKh diharapkan untuk: 1) mencapai kemampuan akademik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, 2) mencapai kemampuan untuk memiliki keterampilan kerja baik mandiri maupun berkelompok, 3) mencapai kemampuan untuk menolong diri sendiri. Menelaah konsep ABKh tersebut memberikan gambaran tentang variasi karakteristik dan keberagaman kebutuhannya bahkan bersifat individual. Kondisi ini tentu tidak mudah dalam memberikan layanan program. Tantangan dalam layanan ABKh yaitu capaian kemandirian pasca layanan.

Berdasarkan rekapan penulis dari hasil observasi, wawancara kepada keluarga, guru, pengambil keputusan pemerintah yang terkait dengan ABKh (tahun 1991-2014), secara garis besar dapat disajikan gambaran tentang pengembangan kemandirian ABKh, antara lain: *pertama*,

dari segi regulasi dalam lima tahun terakhir pemerintah telah memfasilitas program pengembangan kemandirian ABKh, melalui magang keterampilan kerja guru, pengembangan pusat sumber vokasional di sekolah ABKh, pengadaan fasilitas dan sarana belajar, serta pengembangan sekolah inklusif. *Kedua*, adanya regulasi pendidikan yang sifatnya cenderung standar, menumbuhkan persepsi kesamaan program layanan untuk semua kondisi. Artinya pengembangan program tidak didasarkan kebutuhan dan kondisi ABKh. *Ketiga*, dari segi operasional di lapangan masih terdapat kendala operasional, antara lain: keterbatasan sumber daya pendidik, kebijakan program layanan yang berorientasi kurikulum untuk sekolah reguler, kurangnya waktu melatih keterampilan ABKh, sehingga pasca layanan tidak memiliki bekal keahlian kerja, terbatasnya peluang kerja bagi ABKh baik dalam sektor formal dan informal. *Keempat*, masih terdapat sebagian besar masyarakat memandang hanya ABKh dari kondisi fisik yang tampak bukan dari segi potensinya, meskipun sudah banyak contoh ABKh yang mampu mencapai prestasi melebihi anak pada umumnya. *Kelima*, kesadaran sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa ABKh tidak perlu mendapat layanan pendidikan. *Keenam*, sebagian dari ABKh berada dalam kondisi keluarga dengan status sosial rendah, sedangkan untuk memberikan layanan yang komprehensif sejak dini diperlukan biaya, hal ini yang sering muncul sebagai penyebab keterlambatan layanan, *ketujuh*, penyelenggaraan layanan ABKh yang terpisah-pisah antar bidang dan kelembagaan sehingga program tidak komprehensif untuk mencapai kemandirian hidup ABKh.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas yang mendasari masih menjadi peluang untuk dikaji secara konseptual dan

sangat kompleks kondisi ABKh tersebut sehingga memerlukan program layanan khusus. Dalam hal ini lembaga layanan wajib mengakomodasi dengan program-program sesuai kebutuhan ABKh. Program tersebut perlu dirancang secara cermat melalui analisis kebutuhan dan asesmen kondisi ABKh dan dukungan lingkungannya. Pandangan konseptual ini sebagai dasar pijak pengembangan model pengembangan kemandirian berbasis potensi diri dan keterlibatan berbagai pihak dalam layanan disebut sebagai "Multi Sektoral"

2. Program Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus

Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan perkembangan manusia. Perkembangan tersebut, mencakup: perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai kepada perkembangan iman, semuanya ditangani oleh pendidik. Berarti mendidik bermaksud membuat manusia lebih sempurna, membuat manusia meningkatkan hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Mendidik adalah membudayakan manusia (Made Pidarta, 2007). Pendidikan adalah upaya untuk mencapai kemerdekaan dan kematangan potensi individu (Ki Hajar Dewantara: 1977). Menurut Noeng Muhadjir (1987) bertolak dari fungsi pendidikan, yaitu: a) menumbuhkan kreativitas peserta didik (Pendidikan kreativitas); b) menjaga lestari nilai-nilai insani dan nilai-nilai Illahi (pendidikan moralitas); c) menyiapkan tenaga kerja produktif (pendidikan produktifitas). Bertolak dari pandangan filosofis tentang pendidikan memberikan makna operasional bahwa program pendidikan sebagai suatu proses

layanan untuk membentuk kematangan potensi individu mencakup fisik, jiwa dan pemikiran, agar dapat mencapai kemandirian dalam kehidupan. Pendidikan erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya kehidupan.

Terkait dengan konsep pendidikan tersebut maka pengembangan aspek kemandirian bagi ABKh, dikaitkan dengan kematangan kecakapan hidup (*Life Skills*). Kecakapan hidup bagi ABK meliputi keterampilan perilaku adaptif. Menurut Beirne, Ittenback dan Patton (2002) area keterampilan adaptif mencakup aspek: *self-help* atau keterampilan pribadi, perkembangan fisik, komunikasi, *skill* pribadi dan *skill* sosial, kognitif fungsional, perawatan kesehatan, kesejahteraan pribadi, *skill* konsumen, *skill domestic*, orientasi komunitas. Menurut Mannix (2009) kecakapan hidup untuk ABK meliputi: kecakapan menolong diri, kecakapan sosial, kecakapan akademik, kecakapan kehidupan praktis, kecakapan vokasional dan kecakapan pemecahan masalah.

Kecakapan hidup sebagai keterampilan individu untuk menjalani hidup dilingkungannya. Kemandirian akan dicapai apabila individu memiliki kematangan seluruh area kecakapan hidup, sehingga dapat mengambil keputusan tindakan dalam menghadapi persoalan. Dari area kecakapan hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 1) kecakapan dasar yang merupakan kecakapan yang harus dikuasai untuk memahami hakekat makhluk hidup, kehidupan dan agama, 2) kecakapan khusus yang berkaitan untuk penguasaan keterampilan kerja dan pengembangan akademik. Seluruh kecakapan ini merupakan muatan program untuk pengembangan kemandirian ABKh.

3. Peran Masyarakat dalam Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus meliputi peserta didik berkelainan dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Standar proses pendidikan khusus ini, berlaku untuk peserta didik tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunadaksa ringan, tunalaras pada SDLB, SMPLB dan SMALB termasuk sekolah/madrasah penyelenggara pendidikan inklusi/terpadu (Salinan Permendiknas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus).

Hasil penelitian *survay* di Kota Magelang (Ishartiwi, dkk: 2014) merekomendasikan rancangan model layanan pendidikan ABKh "Multi Sektoral". Implementasi model layanan ini diperlukan adanya pusat layanan masyarakat untuk pendataan ABKh, ada sinergi struktural dalam pemerintahan pusat dan daerah, melibatkan berbagai dinas ditingkat daerah dalam operasional, memberikan layanan sejak dini, remaja dan lansia pada individu berkebutuhan khusus, menyediakan lembaga transisi dunia kerja, pengakuan masyarakat ABKh secara wajar, kesadaran masyarakat. Model layanan ini membutuhkan peran serta aktif masyarakat dan pemerintah serta keluarga secara sinergis. Ki Hajar Dewantata (1977) berpandangan tentang "Tri Pusat Pendidikan" bahwa penyelenggaraan pendidikan melibatkan tiga unsur utama yakni sekolah,

pemerintah dan masyarakat. Termasuk di dalam masyarakat yaitu orang tua peserta didik.

Bertolak dari pandangan tentang peran serta masyarakat dalam program layanan maka pendidikan khusus diharapkan sebagai suatu model layanan untuk mengembangkan kemampuan ABKh, sehingga menjadi individu yang mandiri dengan segala keterbatasannya. Pelaksanaan program layanan ini menekankan kerjasama dari berbagai lembaga terkait untuk mewujudkan pandangan "Tri Pusat Pendidikan". Dalam hal ini diperlukan peran serta secara fungsional lembaga layanan ABKh, keluarga ABKh dan masyarakat lingkungan ABKh, lembaga layanan umum serta dunia usaha.

Analisis Kritis

1. Prinsip Pengembangan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus

Prinsip pengembangan model kemandirian ABKh, meliputi beberapa aspek yang terkait langsung terhadap layanan ABKh, sejak indentifikasi awal keberadaan ABKh, pemberian layanan dan pasca layanan. Prinsip tersebut disajikan berikut ini.

- a. Prinsip kebutuhan individual, bahwa kondisi ABKh sangat bervariasi sehingga perlu dianalisa potensinya untuk setiap Abkh.
- b. Prinsip pengulangan dan kesederhanaan, bahwa daya serap informasi ABKh dibatasi adanya kondisi kekhususan sehingga penyajian konsep membutuhkan pengulangan dan di sajikan secara sederhana (unsur kemudahan dan kekonkritan informasi)
- c. Prinsip fleksibilitas, bahwa daya konsentrasi ABKh memiliki

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

“Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal”

keterbatasan karena kondisinya, sehingga perlu modifikasi program mengikuti kondisi ABKh, baik dari segi muatan isi, waktu, target pencapaian, proses, peralatan, dan evaluasi.

- d. Prinsip fungsional, bahwa penetapan isi materi program layanan harus berdaya guna untuk kelangsungan kehidupan ABKh
- e. Prinsip keterlibatan berbagai pihak, bahwa melayani ABKh lebih kompleks isi program layanannya dibanding anak pada umumnya, sehingga kesadaran dan kerjasama fungsional semua sektor lembaga dan kerjasama antar bidang keahlian, masyarakat dan keluarga ABKh merupakan kebutuhan mutlak untuk layanan ABKh.
- f. Prinsip pembiayaan, bahwa kondisi kekhususan ABKh memerlukan peralatan dan sarana prasarana khusus, sehingga perlu menjadi point dalam perencanaan anggaran.

2. Langkah Pengembangan Program kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus

Terdapat tiga langkah pokok dalam pengembangan model program kemandirian ABKh berbasis potensi diri, yaitu: 1) melakukan asesmen dan analisis kondisi ABKh, 2) penetapan area kebutuhan pengembangan potensi ABKh, 3) penetapan materi program kemandirian ABKh. Adapaun Penjelasan tiap-tiap langkah berikut ini.

- a. Melakukan asesmen dan analisis kondisi ABKh

Langkah ini terkait dengan kondisi ABKh yang memiliki variasi jenis kekhususan dan karakteristik individual, sehingga diperlukan analisis kondisi melalui asesmen. Asesmen mencakup beberapa aspek antara lain: kondisi ABKh dan kebutuhannya, dukungan keluarga dan dukungan masyarakat. Kegiatan dalam langkah ini dilakukan oleh lembaga layanan pada awal ABKh akan mengikuti program layanan. Kegiatan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh lembaga layanan, antara lain: ahli medis/dokter, ahli terapi, ahli ortopaedagogik (ahli pendidikan khusus), ahli psikologi, ahli vokasi/bidang keterampilan kerja dan orangtua ABKh. Kegiatan dapat dilakukan melalui observasi dengan instrumen yang sesuai. Dalam hal ini lembaga layanan perlu melakukan kerjasama dengan instansi terkait.

- b. Penetapan Area kebutuhan pengembangan potensi ABKh. Langkah ini ditetapkan berdasarkan dua pertimbangan, yakni: *pertama*: pertimbangan hasil analisis asesmen (langkah pertama) untuk menentukan kedalaman dan keluasan isi program terutama untuk program akademik. *Kedua*: pertimbangan cakupan potensi kecakapan hidup yang perlu dikembangkan pada setiap individu untuk mencapai kemandirian. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui analisis kasus setiap individu ABKh yang dilakukan oleh Tim dalam langkah pertama. Setiap ahli menetapkan area program sebagai muatan isi program kondisi

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"

ABKh. Jika hasil analisis kondisi ABKh terdapat kemiripan kondisi maka program tidak harus bersifat individual, tetapi dapat ditetapkan berdasarkan kelompok kesamaan/kemiripan kondisi dan kebutuhan ABK.

c. **Penetapan materi program kemandirian ABKh.**

Langkah ini dilakukan mengacu pada cakupan area program yang telah ditetapkan dalam langkah ke dua. Materi program berisi bidang-bidang layanan yang akan diberikan ABKh yang diprediksikan dapat mengembangkan kemandirian. Khusus untuk area akademik penetapan keluasan dan kedalaman materi dikaitkan dengan fungsi dan tujuan capaian kemandirian ABKh (*outcomes*) pasca layanan, yakni berupa

akademik umum dan akademik fungsional. Dalam langkah ini setiap Tim bertanggungjawab tentang isi materi dan mekanisme implementasi program layanannya.

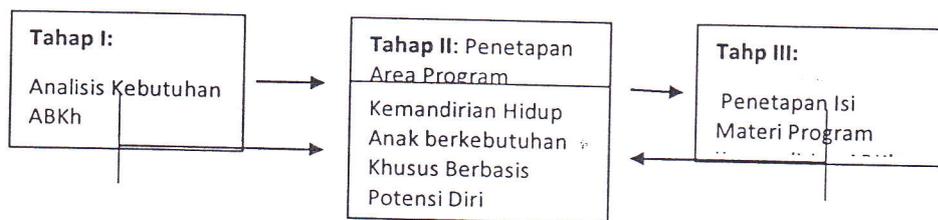
3. *Prototipe* Model Multi Sektoral Pengembangan Kemandirian Berbasis Potensi anak Berkebutuhan Khusus

Model ini menempatkan ABKh sebagai warga generasi bangsa yang memerlukan layanan pengembangan secara khusus untuk mencapai kemandirian.

Berdasarkan prinsip dan langkah pengembangan program di atas dapat digambarkan *prototipe* Model Multi Sektoral Pengembangan Kemandirian Berbasis Potensi anak Berkebutuhan Khusus, berikut ini.

a. **Struktur Model**

Model mencakup tiga tahap, yakni: tahap pertama analisis kebutuhan, tahap ke



Gambar 1. Struktur Model Multi Sektoral Pengembangan Kemandirian Berbasis Potensi anak Berkebutuhan Khusus

a. **Penjelasan Gambar Model**

1). **Tahap I:** analisis kebutuhan ABKh,

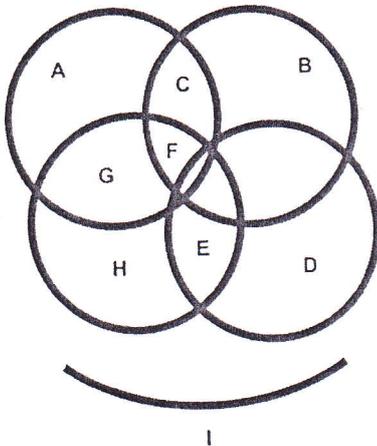
Tahap ini dilakukan melalui kegiatan asesmen kondisi dan kebutuhan belajar. Hasil formulasi kondisi-kondisi dan kebutuhan belajar Anak Berkebutuhan Khusus. Asesmen mencakup beberapa aspek antara lain: kondisi tipe

kekhususan, kemampuan akademik, sosial, fisik. Identifikasi lembaga layanan: in-formal, formal, dan non formal. Identifikasi kebutuhan belajar: akademik dan akademik fungsional, non akademik: program khusus/kompensatoris, terapi, layanan medis. Kebutuhan alat atau sarana untuk

meminimalisasi hambatan (*barier*) akibat kekhususannya dan untuk beradaptasi. Kebutuhan alat bantu

belajar khusus. Dukungan lingkungan: keluarga, masyarakat dan dunia usaha /industri rumah.

2). Tahap II: Penetapan Area Program Layanan Kemandirian ABKk



Keterangan Gambar 2:

- A. = Keterampilan dasar
- B. = Keterampilan sosial
- C. = Bahasa dan pengetahuan sosial
- D. = Keterampilan menolong diri
- E. = Keterampilan orientasi dan mobilitas
- F. = Pengetahuan umum
- G. = Kesenian
- H. = Keterampilan fisik
- I. = Keterampilan jasa/pekerjaan/vokasional

Gambar 2: Struktur Keterkaitan Area Program Layanan Kemandirian ABKk

Tahap II merupakan penetapan area program kemandirian yang didasarkan atas potensi individu. Antar area tersebut saling bergayut satu sama lainnya yang menggambarkan kebutuhan pengembangan diri untuk mencapai kematangannya dilakukan secara komprehensif antar potensi. Setiap individu agar mampu mandiri minimal perlu dikembangkan beberapa aspek, yakni: 1) keterampilan dasar (A) untuk membentuk keterampilan berpikir hakekat, mencakup aspek: membaca, menulis, berpikir matematika, kewarganegaraan, pengetahuan tentang alam dan keagamaan, 2) keterampilan sosial (B) untuk berinteraksi, mencakup: bersosialisasi, berkomunikasi, pengembangan wicara, 3) bahasa dan pengetahuan sosial (C) yang mencakup: bahasa Nasional Indonesia, bahasa daerah dan tatanan

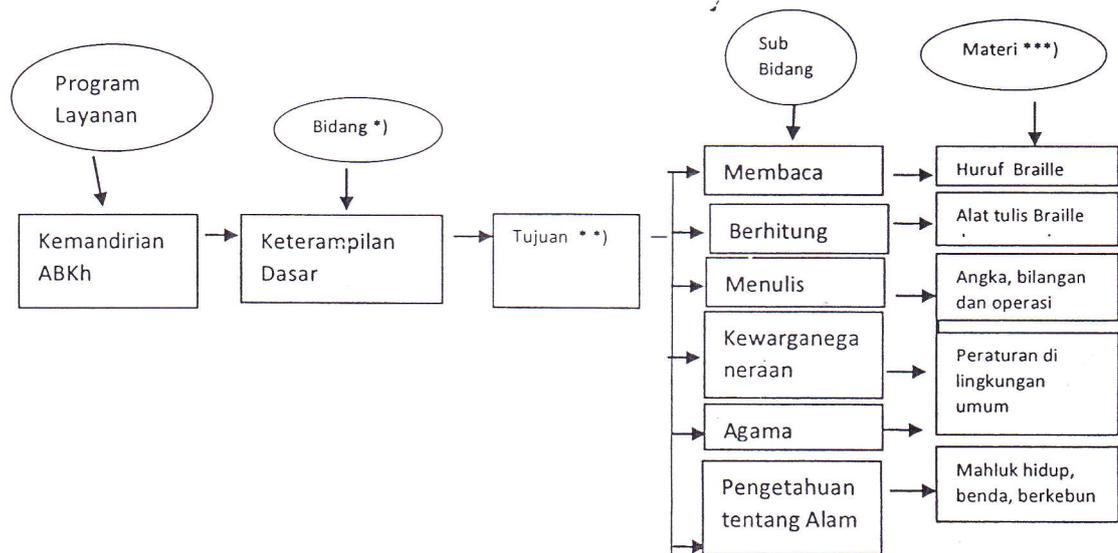
nilai-nilai sosial kemasyarakatan dilingkungan ABKk dan tempat layanan umum, 4) keterampilan menolong diri (D) untuk mengatasi layanan diri sendiri, mencakup: keterampilan menolong diri (contoh: makan, minum, berpakaian, dll), *toilet training*, bina diri untuk keterampilan kerumahtanggaan (kebersihan lingkungan, penataan alat-alat rumah, memasak, tatalaksana pakaian, dll), 5) keterampilan orientasi mobilitas (E) untuk melakukan kegiatan dan *moving* tempat dan ruang, mencakup: mengenal ruang, menggunakan transportasi, susunan benda-benda, melawat/bepergian, 6) Pengetahuan umum (F) untuk melakukan interaksi lebih luas tentang kehidupan dan peran dirinya, antara lain mencakup: pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tata cara menggunakan fasilitas umum,

menghadapai bencana alam, dll, 7) kesenian untuk menguasai budaya dan pengembangan apresiasi, mencakup: budaya daerah, nasional, internasional, keterampilan berkarya seni, 8) keterampilan fisik (H) untuk pengembangan fisik agar tumbuh sehat jasmanu, mencakup anatar lain: sikap tubuh, motorik kasar dan halus, sensomotorik, kemampuan olahraga, 9) keterampilan jasa/pekerjaan/vokasional (I) untuk mengembngkan aspek keterampilan ekonomi yang dapat mencukupi kebutuhan hidup. Minimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri, antara lain mencakup: laitiah kerja untuk memenuhi kebutuhan tenga kerja formal dan tenga kerja informal. Dalam hal pengembangan aspek akademik ini dapat dipertimbangkan dua hal, yakni: akademik umum untuk ABKh yang tidak mengalami hambatan dalam fungsi kognitif sesuai anak umum seusianya dan akademik

fungsional untuk ABKh yang mengalami hambatan fungsi kognitif.

3) **Tahap III.** Penetapan isi materi program kem, andirian ABKh.

Tahap ini merupakan penjabaran isi materi program yang akan menjadi muatan layanan bagi ABKH untuk mencapai kemandirian. Penetapan isi materi untuk masing-masing area bidang dalam tahap II (A-I). Dalam taha ini perlu mempertimbangkan aspek yang terkait dengan mekanisme implementasi proram layanan, yaitu: kurun waktu layanan, lembaga layanan, fungsi program, tujuan capaian program, Aspek tersebut disesuaikan dengan kondisi kekhususan dan kebutuhan ABKh. Cara penetapan isi materi program dapat dicontohkan dalam gambar berikut ini.



Gambar 3: Contoh Penetapan Materi Program Kemandirian Aspek Keterampilan Dasar untuk Anak Tunanetra

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"

Catatan Gambar 3:

- ◆ Bidang: seluruh area bidang dikembangkan sub bidang dan materi secara rinci sesuai kebutuhan dan kondisi ABKh.
- ◆ Contoh tujuan: ABKh penyandang tunanetra dapat hidup sebagai warga masyarakat, beragama dapat mengatasi permasalahan diri terkait dengan informasi di lingkungannya dan dapat memanfaatkan alam untuk kehidupan baik mandiri penuh maupun dengan bantuan di beberapa aspek.
- ◆ Materi: dapat dirumuskan lebih terperinci yang menunjukkan komponen aspek kecakapan yang harus dikuasai sesuai kebutuhan ABKh

Kesimpulan

Model "Multi Sektoral Pengembangan Kemandirian Berbasis Potensi anak Berkebutuhan Khusus" dikembangkan berdasarkan analisis konseptual dan penelitian pendahuluan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan perwakilan wilayah Jawa tengah tentang kondisi ABKh dan layanannya serta harapan masyarakat terhadap ABKh dalam melangsungkan kehidupan. Penggalan potensi ABKh sangat penting dilakukan secara analisis cermat dan menyeluruh terhadap semua aspek agar mendapatkan dasar untuk penetapan keputusan bentuk dan isi program kemandirian yang sesuai ABKh. Implementasi model ini menunjukkan keterlibatan berbagai sektor bidang keahlian dan kelembagaan baik lembaga kedinasan, masyarakat lingkungan ABKh dan dunia usaha/industri. Keterlibatan ini dimulai sejak dalam penetapan jenis kekhususan, proses layanan dan penempatan pasca layanan ABKh. Tidaklanjut dari implementasi *prototipe* model ini, perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain: 1) penelitian untuk penjajagan keterlibatan bidang dan ahli, menguji keefektifan model dan pengembangan mekanisme tata kelola pelaksanaan, 2) komitmen berbagai pihak terutama pemerintah untuk memfasilitasi sumber dana operasional dan sumber daya tenaga ahli dalam layanan ABKh yang berbeda dengan layanan anak didik pada umumnya, 3) mekanisme dan pola kerjasama

antar bidang keahlian perlu dikembangkan dengan penuh kesadaran dalam memberikan layanan ABKh sebagai anggota masyarakat, 4) pendampingan bagi ABKh dan keluarganya untuk mempersiapkan aspek kematangan psikologis berinteraksi dengan masyarakat, 5) kesadaran seluruh warga masyarakat dan pemangku jabatan untuk memiliki persepsi positif terhadap ABKh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernie, S.M., Ittenback, R.F. & Patton, J.R. 2002. *Mental Retardation*. Ohio: Merrill Prentice Hall.
- Hallahan, D.P. & Kauffman, J.M. (2009). *Exceptional Learners: Introduction to Special Education 10th ed.* USA: Pearson.
- http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/ : Education for All, *Naskah Konferensi Internasional (EFA)*, yang diresmikan pada tanggal: 05-09 Maret 1990 di Jomtien, Thailand
- Ishartiwi. (2007). Dampak Intervensi Program Pembelajaran Terindividualisasikan (*Individualized Instruction*) Terhadap Hasil Belajar Keterampilan Fungsional Perilaku Adaptif Anak Retardasi Mental. *Disertasi*. Pascasarjana. Universitas negeri Malang.
- Ishartiwi, dkk. (2014). Perencanaan Pengembangan Pendidikan Khusus dan pendidikan Inklusif untuk Anaka

PROCEEDING SEMINAR NASIONAL

"Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal"

- Berkebutuhan Khusus Jenjang PAUD-RA/SD-MI/SMP-MTs/SMK/A-MA. *Laporan Penelitian Kebijakan Pemerintah Kota Magelang*. Bappeda Kota Magelang dan Pendidikan Luar Biasa. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta
- Ki Hajar Dewantara. (1977). *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Made Pidarta. 2007. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Manix Darlene. 2009. *Life Skills Activities for Scondary Students With Special Needs*. San Francisco. Jossey-Bass.
- Noeng Muhadjir. (1987). Revitalisasi Ilmu pendidikan. *Makalah Diskusi Ilmiah*. Fakultas Ilmu pendidikan. IKIP Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Fakultas Psikologi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102
Email : semnaspiums@yahoo.com
<http://psikologi.ums.ac.id>